

Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Mendasar

Imetrimawati ^{1*}, Efata Emanuel Gulo ², Lifertin Zebua ³, Wita Serlina Waruwu ⁴

¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, Indonesia

Email: imetrimawatitaf@gmail.com ¹, efataemanuel5@gmail.com ², lifertinzebua12@gmail.com ³, witaserlina@gmail.com ⁴

*Penulis korespondensi : imetrimawatitaf@gmail.com

Abstract. *Religious moderation represents one of the fundamental values in shaping a tolerant, inclusive, and civilized national character. Integrating the values of religious moderation into the basic education curriculum serves as a strategic effort to instill moderate religious attitudes from an early age. This article aims to analyze the concept, urgency, and implementation of integrating religious moderation values within Indonesia's basic education curriculum. Using a qualitative-descriptive approach through literature review, this study finds that the implementation of religious moderation can be realized through strengthening the Pancasila student profile, promoting interfaith learning, and embedding the values of tolerance and justice across all subjects. The findings indicate that a curriculum incorporating religious moderation not only develops students' cognitive competencies but also fosters a religious character that appreciates diversity. The study concludes that religious moderation in the curriculum can significantly improve students' cognitive development, while simultaneously cultivating a religious character that embodies the values of tolerance, justice, and social responsibility. Such integration is vital to ensuring a peaceful and prosperous future for the nation.*

Keywords: *Basic Curriculum, Character Education, Cognitive Competence, Religious Moderation, Tolerance.*

Abstrak. Moderasi beragama merupakan salah satu nilai fundamental dalam membentuk karakter bangsa yang toleran, inklusif, dan berkeadaban. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum mendasar menjadi upaya strategis untuk menanamkan sikap keberagamaan yang moderat sejak dini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, urgensi, serta implementasi integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai moderasi beragama dapat dilakukan melalui penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran lintas agama, serta penanaman nilai toleransi dan keadilan dalam setiap mata pelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang mengintegrasikan moderasi beragama tidak hanya membangun kompetensi kognitif siswa, tetapi juga membentuk karakter religius yang menghargai keberagaman. Studi ini menyimpulkan bahwa moderasi agama dalam kurikulum dapat secara signifikan meningkatkan perkembangan kognitif siswa, sekaligus menumbuhkan karakter religius yang mewujudkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Integrasi semacam itu sangat penting untuk memastikan masa depan yang damai dan sejahtera bagi bangsa.

Kata Kunci: Kompetensi Kognitif, Kurikulum Mendasar, Moderasi Beragama, Pendidikan Karakter, Toleransi.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan dasar memegang peranan strategis dalam membangun fondasi karakter serta membentuk cara pandang peserta didik terhadap kehidupan berbangsa dan beragama. Pada jenjang ini, perkembangan nilai moral, sosial, dan spiritual anak mulai terbentuk dan menjadi dasar bagi kepribadian mereka di masa depan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, penanaman nilai-nilai moderasi beragama sejak dini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Moderasi beragama tidak semata-mata dimaknai sebagai sikap berada di tengah antara dua ekstrem, tetapi juga mencakup upaya menumbuhkan toleransi, menghargai

perbedaan, serta menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama dan berinteraksi dalam kehidupan sosial (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan dasar diharapkan mampu membantu peserta didik memahami ajaran agamanya secara lebih mendalam, tidak hanya pada tataran tekstual, tetapi juga dalam penerapannya secara kontekstual di tengah kehidupan masyarakat yang plural (Azyumardi Azra, 2012). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Dengan demikian, pendidikan dasar memiliki kontribusi penting dalam membentuk generasi yang memiliki sikap beragama secara moderat, berpikir terbuka, serta mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Moderasi dalam KBBI merupakan pengurangan kekerasan, penghindaran keestriman (KBBI). Sedangkan moderasi dalam bahasa Ibrani modern kata moderasi adalah “*metinut*”. Kata ini memiliki makna yang terkait dengan kesederhanaan, kehati-hatian, kelembutan dan kesabaran. Dalam konteks Alkitabiah atau teks-teks keagamaan yang lebih tua seperti perjanjian lama, penulisan moderasi ditulis dalam bahasa ibrani, sedangkan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani yang disebut dengan “*metriopqela*” yang bermakna kesederhanaan atau kewarasan, padanan untuk konsep moderasi diutarakan melalui berbagai kata dan frasa yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah. Secara singkat, *metinut* adalah terjemahan langsung untuk moderasi dalam bahasa ibrani kontemporer, sementara konsepnya dalam teks-teks kuno lebih bersifat prinsip hidup yang adil dan seimbang.

Moderasi merupakan pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang (Sudarji, 2020).

Secara etimologis, kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderatio* yang berarti “kesedangan” atau “cukup” dengan kata lain dimaksudkan dengan istilah “tidak berlebihan dan tidak kekurangan”, dalam hal ini tertuju kepada penguasaan diri untuk menghindari diri dari sikap yang sangat berlebihan dan sikap kekurangan. Sedangkan moderasi dalam konteks sosial dan etika dipandang sebagai sikap yang mengutamakan keseimbangan dalam berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti agama atau etnis. Dalam

konteks sosial dan etika, moderasi mengarah kepada sikap yang humanis untuk mengayomi semua lapisan sosial.

Beragama adalah memeluk atau menganut suatu agama, sedangkan agama itu sendiri mengandung arti system, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang menyangkut dengan kepercayaan itu sendiri. Beragama dalam arti lain menganut agama. Secara istilah beragama mengedepankan damai, kasih sayang, kapanpun dimanapun dan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang.

Moderasi beragama sebagaimana menurut Komaruddin Hidayat muncul karena ada dua kutub ekstrim, yakni ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan terlalu terpaku terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sementara ekstrim kiri cenderung mengabaikan teks. Moderasi beragama berada ditengah-tengah dari kedua kutub ekstrim tersebut, yakni menghargai teks tetapi memberikan ruang untuk memperhatikan konteks.

Moderasi beragama bukanlah konsep baru, melainkan bagian integral dari ajaran agama dan budaya bangsa Indonesia. Secara konseptual, moderasi beragama menekankan keseimbangan antara dua kutub ekstrem dalam beragama: liberalisme berlebihan dan konservatisme sempit. Menurut Lukman Hakim Saifuddin (2020), moderasi beragama mengandung empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal.

Dalam konteks pendidikan, integrasi nilai moderasi beragama berkaitan erat dengan teori pendidikan karakter. Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter berfokus pada pembentukan moral knowing, moral feeling, dan moral action. Melalui kurikulum yang berorientasi pada nilai, peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai moral dan religius yang membentuk perilaku moderat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan angka, melainkan kata-kata (Muriana, Saenom, Felipus 2024:97). Penelitian kualitatif berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan untuk mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dan lebih mementingkan proses untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan (Sheilla Susanti and Marthen Mau 2021:19). *Library research* pengumpulan data dan informasi menggunakan sumber tertulis, yang

bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan author dari berbagai sumber tertulis, yang relevan dengan topik masalah penelitian (Logius, Gianto, Saenom 2025:50)

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta dokumen kurikulum yang berkaitan dengan moderasi beragama dan pendidikan dasar. Jadi, tujuan library research ialah untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis dari berbagai sumber, yang antara lain melalui buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang korelasi langsung dengan pokok persoalan yang dipaparkan penulis (Viter, Daniel Marciano Kapoh, Lukas Budi 2023:37). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep serta strategi integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks kurikulum pendidikan dasar di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang dan praktik beragama yang menempatkan keseimbangan antara keteguhan dalam menjalankan ajaran agama dan sikap menghormati keyakinan orang lain. Dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia yang plural, moderasi beragama memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya (Muhammad Ali, 2020). Konsep ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan keyakinan beragama, melainkan mengarahkan umat agar menjalankan ajaran agamanya secara adil, terbuka, dan tidak eksklusif.

Kementerian Agama Republik Indonesia memaknai moderasi beragama sebagai pola pikir, sikap, dan perilaku beragama yang mengedepankan keseimbangan antara pemahaman keagamaan secara tekstual dan kontekstual (Kemenag, 2019). Dengan demikian, individu yang beragama secara moderat tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya, namun pada saat yang sama mengakui dan menghormati hak pihak lain untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam moderasi beragama meliputi komitmen kebangsaan, sikap toleransi, penolakan terhadap kekerasan, serta penerimaan terhadap kearifan dan tradisi lokal (Said Aqil Siradj, 2018).

Dalam dunia pendidikan, moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen penting dalam pembentukan karakter peserta didik yang religius sekaligus berwawasan kebangsaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai

sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (UU RI No. 20 Tahun 2003). Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya relevan dalam ranah keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan pedagogis.

Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Dasar

Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan dasar dapat dimaknai sebagai upaya sistematis untuk menanamkan prinsip-prinsip moderasi ke dalam seluruh proses pendidikan. Integrasi tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui mata pelajaran keagamaan dan Pendidikan Pancasila, serta secara tidak langsung melalui pembiasaan sikap dan penguatan budaya sekolah (Ahmad Baso, 2021). Pendidikan dasar merupakan fase krusial karena pada tahap ini peserta didik mulai mengenal perbedaan dan belajar membangun empati sosial.

Implementasi integrasi nilai moderasi beragama dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan kurikuler, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai moderasi ke dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, serta capaian pembelajaran. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, misalnya, peserta didik dikenalkan pada konsep *ukhuwah insaniyah* sebagai bentuk persaudaraan universal dan pentingnya sikap saling menghormati antarumat beragama (Nurul Huda, 2022).

Kedua, pendekatan pedagogis yang diwujudkan melalui penerapan metode pembelajaran yang partisipatif, dialogis, dan reflektif. Guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus yang mendorong kerja sama dan interaksi antar peserta didik dengan latar belakang yang beragam (Siti Rahmawati, 2021). Melalui proses ini, nilai toleransi tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Ketiga, pendekatan kultural yang berfokus pada pembentukan iklim dan budaya sekolah yang inklusif. Kegiatan seperti upacara bendera, aksi sosial, serta peringatan hari besar keagamaan dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menumbuhkan sikap kebersamaan dan saling menghargai (Lukman Hakim, 2021). Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan menjadi bagian dari pengalaman hidup peserta didik.

Tantangan Historis Moderasi Beragama

Secara historis, Indonesia merupakan bangsa yang terbentuk dari keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan, memahami perbedaan, serta membangun kerja sama demi kepentingan bersama. Dalam konteks tersebut, spirit moderasi beragama menjadi

fondasi penting bagi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Kerja sama antarpemeluk agama hanya dapat terbangun apabila dilandasi oleh sikap saling percaya dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa kesadaran kolektif mengenai perdamaian yang substansial belum sepenuhnya terwujud. Mengacu pada pemikiran Johan Galtung, kondisi masyarakat yang hanya terbebas dari konflik fisik atau kekerasan terbuka masih berada pada tahap perdamaian negatif. Dalam situasi ini, ketegangan sosial, rasa takut, pembatasan kebebasan, serta intimidasi masih dapat dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat (Galtung, 1969).

Pada tahap perdamaian negatif tersebut, masyarakat belum sepenuhnya mencapai kondisi koeksistensi yang ideal. Konsep *convivencia*, yang dikenal dalam sejarah Spanyol abad pertengahan, menggambarkan suatu keadaan di mana kelompok masyarakat yang berbeda agama dan budaya mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan dukungan negara yang menjalankan peran fungsionalnya secara seimbang. Pada masa itu, perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi kerja sama sosial, intelektual, maupun ekonomi.

Istilah *convivencia* juga mengandung makna interaksi timbal balik yang kreatif antar kelompok masyarakat. Tempat-tempat ibadah dari berbagai agama tidak jarang terlibat dalam kegiatan bersama dan saling membantu. Tidak adanya sikap superioritas keagamaan maupun intelektual memungkinkan berkembangnya kehidupan intelektual yang maju, karena para cendekiawan dari latar belakang berbeda dapat bekerja sama tanpa tekanan identitas keagamaan.

Keberhasilan koeksistensi tersebut tidak terlepas dari peran pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian serta masyarakat yang aktif menjalankan kehidupan beragama dan kewarganegaraan secara seimbang (Ali, 2008). Jika dilihat dari perspektif fungsionalisme struktural, setiap unsur masyarakat pada masa itu mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dan saling mendukung satu sama lain (Parsons, 1987).

Praktik moderasi beragama dan multikulturalisme yang dapat dijadikan contoh baik (*best practice*) antara lain ditunjukkan dalam konteks kehidupan sosial-keagamaan di Azerbaijan. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Moch Riza Fahmi, negara tersebut memperlihatkan peran negara yang kuat dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk kebebasan beragama, berekspresi budaya, penggunaan bahasa, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kondisi ini tercermin dari minimnya konflik keagamaan, baik antara kelompok Sunni dan Syiah maupun antara pemeluk agama yang berbeda seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster, yang semuanya dapat hidup berdampingan

secara damai. Fahmi menilai bahwa keragaman sosial-keagamaan Azerbaijan memiliki kemiripan dengan kondisi Indonesia, sehingga praktik moderasi beragama dan multikulturalisme yang diterapkan di negara tersebut berpotensi menjadi referensi bagi Indonesia. Namun demikian, penerapan model serupa di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana.

Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran fungsional negara dalam mengelola kehidupan keagamaan. Kementerian Agama, misalnya, kerap dipersepsikan sebagai institusi yang sarat kepentingan politik sehingga dinilai belum sepenuhnya mampu berperan sebagai mediator dan penggerak kerukunan antarumat beragama. Alih-alih menjadi pengayom seluruh pemeluk agama, lembaga ini sering kali dianggap lebih berfungsi sebagai instrumen kekuasaan. Pengalaman pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap agama bersifat terbatas, dan peran Kementerian Agama saat itu cenderung menjadi legitimasi kebijakan rezim. Akibatnya, konflik antarumat beragama tidak dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan (Ali, 2008).

Persoalan tersebut juga tercermin dalam isu-isu sensitif seperti perkawinan beda agama. Danu Aris Setyanto menyoroti bahwa ketidakhadiran regulasi yang tegas dan jelas dari negara justru memperpanjang polemik di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk hadir secara berani melalui kebijakan yang adil dan transparan agar persoalan keagamaan tidak terus menjadi sumber konflik sosial.

Apabila moderasi beragama hanya diposisikan sebagai alat politik yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat—sebagaimana konsep *panopticon* yang dikemukakan oleh Foucault—maka cita-cita mewujudkan perdamaian positif akan sulit tercapai dan berpotensi hanya menjadi wacana utopis. Tantangan dalam membumikan moderasi beragama pada masa kini jauh lebih kompleks dibandingkan persoalan-persoalan keagamaan pada masa sebelumnya.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan keagamaan. Terbukanya ruang demokrasi memberikan peluang bagi berbagai kelompok keagamaan untuk mengekspresikan ideologi dan kepentingannya secara lebih bebas. Namun, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok keagamaan ekstrem untuk memperluas pengaruhnya. Mereka berkembang seiring dengan masuknya ideologi-ideologi keagamaan transnasional dan membentuk jaringan baru di tingkat lokal, termasuk melalui

pendirian lembaga pendidikan, media, serta kegiatan sosial yang sarat muatan ideologis (Hasan, 2006).

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, negara perlu memberikan dukungan terhadap komunitas-komunitas lintas iman yang berperan penting dalam membangun dialog antarumat beragama. Penelitian Miftadin dan Lilam Kadarin Nuriyanto menunjukkan bahwa komunitas lintas iman memiliki kontribusi signifikan dalam menumbuhkan sikap inklusif dan pluralis di tengah masyarakat. Salah satu contoh adalah komunitas perempuan lintas iman Purwakanthi di Sukoharjo, yang aktif mempromosikan toleransi, memperkuat dialog antaragama, serta mengadvokasi isu-isu kemanusiaan dan keagamaan. Komunitas ini mengembangkan pendekatan teologi transformatif yang memandang keimanan sebagai bagian integral dari etika sosial dan praktik keberagamaan sehari-hari.

Pendekatan teologis tersebut selaras dengan gagasan “Tauhid Kedamaian” yang menekankan pentingnya menampilkan ekspresi keberagamaan yang ramah dan inklusif terhadap pemeluk agama lain. Namun demikian, upaya memperkuat moderasi beragama tetap menghadapi tantangan besar, terutama karena masifnya pergerakan kelompok keagamaan ekstrem di ruang publik. Jika tidak diimbangi secara serius, kondisi ini berpotensi mengubah pola keberagamaan masyarakat Indonesia yang sebelumnya inklusif menjadi lebih eksklusif.

Laporan Setara Institute tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Tercatat 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pelanggaran tersebut banyak melibatkan aparaturnegara, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, serta institusi pendidikan negeri (Silvia, 2023). Jenis pelanggaran yang paling dominan berkaitan dengan penolakan dan perusakan rumah ibadah, yang dalam rentang 2007–2022 mencapai ratusan kasus (Ismail, 2022).

Fenomena ini tidak terlepas dari keterlibatan generasi muda yang terpapar paham ekstrem melalui berbagai saluran. Proses radikalisis tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui infiltrasi ideologi yang sistematis (Qodir, 2018; Sirry, 2023). Laporan penelitian LIPI pada tahun 2016 mengungkap bahwa kelompok-kelompok keagamaan ekstrem telah menyasar lingkungan perguruan tinggi dengan merekrut mahasiswa melalui kegiatan keagamaan informal. Temuan ini diperkuat oleh survei Alvara Research Center yang menunjukkan meningkatnya kecenderungan sikap intoleran dan radikal di kalangan mahasiswa (Prima, 2016; Tribunnews.com, 2017).

Kemudian, berita tak kalah mengejutkan Ketika Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merilis temuan mereka pada tahun 2018 tentang tujuh perguruan tinggi negeri terkemuka yang tersusupi paham dari kelompok-kelompok keagamaan ekstrem.

Bahkan, terdapat sejumlah besar mahasiswa/i yang simpatik dengan ideologi dan gerakan yang diusung kelompok-kelompok keagamaan ekstrem ini (Lebih lanjut baca Alius, 2019).

Semua hasil temuan di atas merupakan indikasi kuat bahwa ancaman radikalisasi pada kalangan generasi muda adalah nyata dan sudah sangat mengkhawatirkan. Malahan, banyak hasil penelitian menunjukkan irisan antara tindakan radikalisme dan bahkan terorisme dengan mereka yang terpapar paham kelompok-kelompok keagamaan ekstrem ini (Borum, 2003; Precht, 2007; Wiktorowick, 2005; Wiktorowicz, 2004).

Untuk itu, tantangan berikutnya ialah bagaimana program-program penguatan moderasi beragama bisa masif diberikan kepada kaum muda dengan memanfaatkan media-media baru sebagai sumber belajar. Sulit dimungkiri bagaimana kaum muda pada hari ini adalah mereka yang digolongkan generasi digital native, yang belajar dari sumber-sumber demikian (Prensky, 2001), termasuk dalam soal agama (Hasan, 2018). Konteks inilah yang diulas oleh Acmad Faesol dalam tulisannya di buku ini. Menurutnya, penguatan moderasi beragama selayaknya bisa menyasar pemanfaatan media-media baru (terutama media sosial) jika ingin berdampak besar pada kaum muda.

Berbagi pandangan yang sama dengan Faesol, yaitu Martinus Danang Pamungkas, Nuarisa Effrata, dan Winda Rita Dewi Lumbangaol menyampaikan bahwa dalam hal ini keterlibatan influencer yang mendiseminasikan konten-konten moderasi beragama di ruang digital sangatlah penting. Bahkan, menurut Ali Mursyid Azisi, sebagaimana tulisannya di buku ini, dialog lintas iman sebagai wujud dari moderasi beragama sangat bisa memanfaatkan ruang digital ini.

Tantangan dalam Implementasi Dalam Dunia Pendidikan

Meskipun urgensi moderasi beragama telah banyak diakui, implementasinya di tingkat pendidikan dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih terdapat guru yang memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep moderasi beragama secara komprehensif (Siti Rahmawati, 2021). Akibatnya, nilai-nilai moderasi belum sepenuhnya diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Kedua, faktor lingkungan sosial yang homogen sering kali membuat peserta didik kurang memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan perbedaan. Dalam situasi seperti

ini, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ruang belajar yang memperkenalkan realitas keberagaman secara positif (Azyumardi Azra, 2012).

Ketiga, belum semua sekolah memiliki dukungan kebijakan dan sumber belajar yang memadai untuk mengimplementasikan pendidikan moderasi beragama (Fathurrahman, 2021). Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat sinergi dalam menyediakan panduan, pelatihan, serta bahan ajar yang relevan bagi guru dan sekolah dasar.

Strategi Penguatan Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Agar integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum dasar dapat berjalan efektif, diperlukan beberapa strategi penguatan. Pertama, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan mengenai moderasi beragama dan pendidikan multikultural (Winarno, 2019). Guru adalah agen utama dalam membumikan nilai moderasi melalui praktik pembelajaran yang inspiratif dan humanis. Kedua, pengembangan bahan ajar kontekstual yang mencerminkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan perdamaian. Bahan ajar tersebut hendaknya disusun dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar lebih dekat dengan kehidupan siswa (Kemendikbudristek, 2022).

Ketiga, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung praktik moderasi beragama di lingkungan sekolah. Pendidikan moderasi tidak akan berhasil tanpa dukungan lingkungan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai inklusif dan saling menghormati (Syamsuddin, 2022). Disisi lain, beragam upaya yang bisa dijadikan alternative dalam mensosialisasikan moderasi beragama dapat dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

1. Melalui Lembaga Pendidikan Formal

Penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan formal dikenal dengan sebutan pendidikan moderasi beragama. Satu kesalahan fatal apabila memungkiri bahwa salah satu tempat strategis menumbuhkan sikap moderasi beragama adalah lembaga pendidikan formal karena akan langsung menyentuh jiwa generasi-generasi penerus bangsa.

Pendidikan moderasi beragama dalam istilahnya diartikan sebagai proses melakukan development kepada anak-anak bangsa agar mampu memahami, menghayati dan mengamalkan sikap moderasi beragama demi terwujudnya masyarakat yang rukun dan harmonis (Albana, 2023).

Pendidikan moderasi beragama di lembaga pendidikan formal dapat diformulasikan guru dalam proses belajar mengajar. Tenaga pendidik dapat memasukkan pendidikan moderasi beragama melalui metode pembelajaran seperti diskusi, kerja kelompok, dan studi tour.

Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan pendidikan dasar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam beragama dan berinteraksi sosial.

2. Melalui lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan Pendidikan pertama dan utama bagi anak. Nilai-nilai moderasi beragama sangat efektif ditanamkan sejak melalui pola asuh, keteladanan, serta komunikasi yang baik dalam keluarga. Orang tua memiliki peranan strategis dalam menanamkan sikap toleransi, saling menghormati perbedaan, serta menghindarkan anak dari sikap fanatisme sempit dalam beragama. Penanaman moderasi beragama di lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui pembiasaan sikap saling menghargai, diskusi terbuka mengenai perbedaan keyakinan, serta memberikan pemahaman bahwa keberagaman merupakan realitas sosial yang harus disikapi dengan bijaksana. Dengan dukungan keluarga yang harmonis, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang moderat, terbuka, dan memiliki sikap empati terhadap sesama.

3. Melalui lingkungan Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan internalisasi nilai-nilai moderasi Beragama. Lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis dapat menjadi ruang praktik nyata bagi individu dalam menerapkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Upaya sosialisasi moderasi beragama di masyarakat dapat melalui kegiatan keagamaan Bersama, dialog lintas agama, kerja bakti, serta kegiatan sosial yang melibatkan berbagai latar belakang kepercayaan. Dengan adanya interaksi yang intens dan positif, masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan dalam keberagaman.

4. Melalui Media Massa dan Media Digital

Media massa dan media digital memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola pikir dan sikap masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, media dapat dimanfaatkan sebagai sarana strategis untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama secara luas dan berkelanjutan. Konten edukatif seperti artikel, video, podcast, dan kampanye digital yang mengangkat pesan toleransi, perdamaian, dan keberagaman dapat membantu menangkal narasi ekstremisme dan intoleransi. Pemanfaatan media secara bijak diharapkan mampu membangun kesadaran public tentang pentingnya sikap moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan konsep yang memiliki nilai luhur dan sangat penting diterapkan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada di Indonesia sejatinya adalah sebuah karunia dan anugerah yang perlu dijaga dengan rukun satu sama lain. Dalam lembaga pendidikan, moderasi beragama sebagai perisai penangkal paham intoleransi dan radikalisme yang masuk dan menyusup tanpa disadari. Baik pemerintah maupun guru memiliki peran yang penting untuk mendukung terlaksananya moderasi beragama di Indonesia. Peran penting guru sebagai pendidik adalah untuk membentuk akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai moderasi beragama supaya terjadi kerukunan antar umat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Baso (2021). *Pendidikan Multikultural dan Moderasi Beragama*, Bandung: Alfabeta, hlm. 77.
- Ali, M. (2008). *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai kemajemukan menjalin kebersamaan*. Kompas.
- Alius, S. (2019). *Pemahaman membawa bencana: Bunga rampai penanggulangan terorisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Aspinall, E. (1999). Opposition and elite conflict in the fall of Soeharto. Dalam G. Forrester & R.J. May (Ed.), *The fall of Soeharto*. Select Books.
- Azyumardi Azra (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hlm. 51.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Borum, R. (2003). *Understanding the Terrorist Mindset*. FBI Law Enforcement Bulletin, 72(7), 7-10. <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/201462.pdf>
- Fathurrahman (2021). "Tantangan Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah Dasar," *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 9, No. 1: 71-85.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2017). *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, hlm. 15.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022) *Panduan Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Moderasi Beragama di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kemendikbudristek, hlm. 33.

- Logius, Gianto, Saenom, dan Marthen Mau. 2025. "Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik." *Sinar Kasih*(Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat) 3(1). doi: <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v3i1.556>.
<https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v3i1.566>
- Lukman Hakim (2021). "Implementasi Nilai Moderasi dalam Kurikulum Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1: 44-57. <https://doi.org/10.56916/ejip.v1i4.188>
- Muhammad Ali (2020). *Moderasi Beragama dan Tantangannya di Era Globalisasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 23.
- Muriana, Saenom, Felipus, Marthen Mau. 2024. "Pentingnya Pendampingan Orangtua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Dari Rumah Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Anak Usia 10-12 Tahun Di Dusun Sentagi." *Jurnal Coram Mundo: Teologi & Pendidikan Agama Kristen* 6(1). doi: <https://doi.org/10.55606/corammundo.v6i1.287>.
<https://doi.org/10.55606/corammundo.v6i1.287>
- Nurul Huda (2022). *Integrasi Nilai Moderasi dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar*, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 12, No. 2:155-168.
- Said Aqil Siradj (2018). *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara untuk Dunia*, Jakarta: LP Ma'arif PBNU, hlm. 62.
- Sheilla Susanti, and Marthen Mau. 2021. "PERANAN GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN SETIA BAKTI EMPAONG." *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3(1):15-20. doi: 10.55606/corammundo.v3i1.15. <https://doi.org/10.55606/corammundo.v3i1.15>
- Siti Rahmawati (2021). *Praktik Moderasi Beragama di Sekolah Dasar: Pendekatan Kontekstual*, Malang: UMM Press, hlm. 91.
- Sudarji (2020) *Moderasi Islam. Untuk Peradaban dan Kemanusiaan*, Edukasi: *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 1 Issue 1, hlm. 97. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v1i1.11>
- Syamsuddin (2022). "Peran Keluarga dalam Pendidikan Moderasi Beragama," *Jurnal Tarbawi*, Vol. 11, No. 2: 112-125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.
- Viter, Daniel Marciano Kapoh, Lukas Budi, Marthen Mau. 2023. "Pentingnya Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen Meningkatkan Minat Membaca Alkitab Bagi Peserta Didik Kelas VII Di SMP Negeri 1 Teriak Kabupaten Bengkayang." *Jurnal DIKMAS Arastamar Ngabang* 5(2). doi: <https://doi.org/10.55606/dikmas.v5i2.286>.
<https://doi.org/10.55606/dikmas.v5i2.286>

Winarno (2019). *Pendidikan Nilai dan Karakter di Sekolah Dasar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 108.